

Menyelami APBN Indonesia: Potret Anggaran dan Analisis Perkembangan dari Periode ke Periode

¹Vera Rahmayanti, ²Syakraeni2, ³Muh. Nurham, ⁴Kamiruddin, ⁵Arifin Sahaka
^{1,2,3,4,5} Pasca Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

E-mail: ¹verarahmayanti17@gmail.com, ²syakraeni2608@gmail.com,
³muh.nurham2815@gmail.com, ⁴kamiruddin@iain-bone.ac.id,
⁵arifin.sahaka73@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perkembangan dan perubahan dari periode ke periode. Kasus-kasus yang diteliti melibatkan alokasi anggaran pada sektor strategis seperti infrastruktur dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren APBN, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan alokasi, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pengumpulan data dari laporan pemerintah, dokumen APBN, dan referensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran negara fokus pada sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun ada fluktuasi pencapaian target. Faktor penyebab perubahan anggaran meliputi dinamika perekonomian, kebutuhan pembangunan infrastruktur, dan prioritas kebijakan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengelolaan anggaran, peningkatan efisiensi, dan penyesuaian strategi anggaran berdasarkan kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berkembang.

Kata Kunci : *Anggaran, Pendapatan, Belanja Negara*

ABSTRACT

This study examines Indonesia's State Budget (APBN) using a qualitative approach to analyze its development and changes over different periods. The cases studied involve budget allocations in strategic sectors such as infrastructure and education. The research aims to analyze APBN trends, factors influencing allocation changes, and evaluate the effectiveness of budget utilization. The method used is a literature review with data collected from government reports, APBN documents, and related references. The findings indicate that the state budget focuses on sectors supporting economic growth, although there are fluctuations in achieving targets. Factors influencing budget changes include economic dynamics, infrastructure development needs, and government policy priorities. This study recommends strengthening budget management, improving efficiency, and adjusting budget strategies based on evolving economic and social needs.

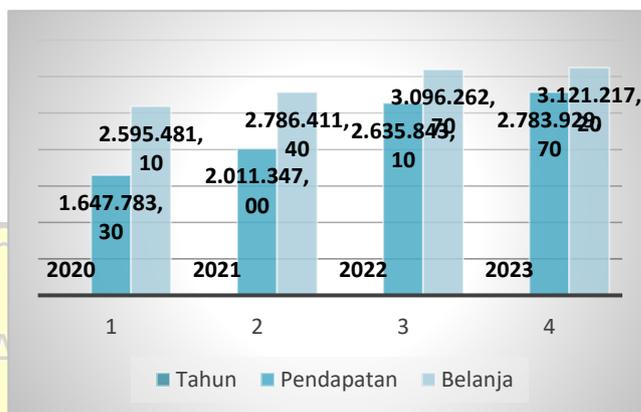
Keywords: *Budget, Revenue, State Expenditure*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal Indonesia saat ini cenderung membebani rakyat, sementara potensi penerimaan dari sumber daya alam tidak dimaksimalkan. Hal ini dibuktikan melalui tiga fakta sebagai berikut; Pertama, kenaikan PPN menjadi 12% yaitu pemerintah Indonesia berencana menaikkan PPN menjadi 12% mulai 2025, yang diprediksi akan menurunkan PDB riil sebesar 0,03%, ekspor menurun 0,5%, dan inflasi naik 1,3%, yang akan memberikan tekanan pada daya beli masyarakat dan pendapatan perusahaan (CNN Indonesia, 2024). Kedua, Kehilangan potensi penerimaan negara dari sektor batubara akibat skema bagi hasil yang tidak adil, meskipun sektor ini menghasilkan keuntungan besar bagi pengusaha, tercermin dari data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM mencapai Rp351 triliun, dengan kontribusi terbesar dari mineral dan batubara sebesar Rp172,96 triliun. (Pribadi, 2023). Ketiga, eksploitasi sumber daya alam tanpa kontribusi yang sebanding untuk negara yaitu meskipun sektor batubara menghasilkan keuntungan bersih Rp 1.500 triliun, penerimaan negara dari sektor ini hanya sekitar Rp 300-400 triliun, menunjukkan ketimpangan dalam pembagian hasil sumber daya alam. (Chaniago, 2024).

Berikut data terkait anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia Pada tahun 2020-2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2024. Gambar 1 menunjukkan bahwa belanja negara setiap tahun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara, menunjukkan defisit anggaran yang berlanjut dari tahun ke tahun. Namun, terlihat ada upaya peningkatan pendapatan negara untuk mendukung belanja yang terus meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya

tantangan dalam pengelolaan anggaran untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.



Negara 2020-2023

Penelitian tentang APBN di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Cindy Amelia Putri, et.al mengkaji aspek peran APBN. (Putri et al., 2024). Sementara Ratna Wulandari, et.al meneliti tentang pendanaan defisit APBN Indonesia (Ratna Wulandari et al., 2023). Selanjutnya Siti Aminah membahas APBN dari aspek wewenang pengawasan oleh DPR. (Aminah, 2024). Sedangkan Ni Luh Putu Riska Pebriyanti dan Ida Bagus Anggapurana Pidada mengkaji dari aspek tindak korupsi penyalahgunaan dana APBN (Pebriyanti & Pidada, 2023). Penelitian sebelumnya hanya membahas aspek peran dan fungsi APBN, pendanaan defisit, wewenang pengawasan DPR, serta tindak korupsi dalam pengelolaan dana APBN. Namun, penelitian yang fokus pada analisis perkembangan dan perubahan APBN dari periode ke periode masih kurang melakukannya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dan menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini akan fokus pada analisis dinamika anggaran, kebijakan fiskal, dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke

waktu. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai tren anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal, dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi, yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2. LANDASAN TEORI

Pendapatan Negara

Anggaran negara merupakan elemen penting yang mendukung kelancaran pemerintahan suatu negara. Pengertian anggaran (*budget*) menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson adalah “*A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals*”. (Putri Darma et al., 2024). Secara sederhana, anggaran dapat diartikan sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan sebuah entitas (seperti keluarga, perusahaan, atau pemerintah), yang berisi informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, kegiatan, dan sasaran yang ingin dicapai.

Pendapatan negara dalam APBN terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu penerimaan pajak, penerimaan selain pajak, dan hibah. Hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak dimasukkan ke dalam kategori penerimaan bukan pajak. Sebaliknya, hibah telah diperlakukan sebagai sumber pendapatan yang terpisah dan berdiri sendiri, menjadi salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan negara sebagaimana tercantum dalam APBN (Rusdi, 2021)

Belanja Negara

Secara teori, belanja pemerintah melalui APBN memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Teori Keynesian menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau sedang mengalami tekanan, seperti ketidakpastian global dan

perlambatan ekonomi, pengeluaran pemerintah menjadi alat penting untuk mendorong permintaan agregat. Keynes mengidentifikasi tiga indikator utama yang memengaruhi permintaan agregat dan mendorong perekonomian secara keseluruhan: konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. (Ani Irwan, Hana Siti NAbila, Yolla Maharany Irawan, 2024).

a. Konsumsi

Konsumsi merupakan pendorong utama dalam meningkatkan permintaan agregat. Melalui APBN, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang mendorong konsumsi, seperti subsidi dan bantuan sosial, guna meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Alokasi dana untuk konsumsi ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan sosial dan memperkuat daya beli masyarakat sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Belanja sosial dalam APBN diharapkan dapat mendorong konsumsi yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup.

b. Investasi

Di Indonesia, pemerintah melalui APBN mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, yang berpotensi menciptakan efek berantai bagi perekonomian. Proyek-proyek infrastruktur yang didanai APBN, seperti pembangunan jalan tol, sarana transportasi, dan konektivitas antardaerah, dapat mendorong investasi swasta dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

c. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam APBN Indonesia diarahkan ke sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi ketimpangan sosial. Belanja

pemerintah yang efisien dan terarah tidak hanya berfungsi sebagai stimulus jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan (Desmawan & Syaifudin, 2020)

3. METODOLOGI

Penelitian ini mengaplikasikan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Indonesia serta menganalisis perkembangan dan perubahan dari periode ke periode. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali dan memahami aspek-aspek mendalam terkait tren, kebijakan, dan dinamika dalam APBN, yang bersifat kompleks dan multifaset. Data dikumpulkan dengan cara menelusuri berbagai referensi, seperti laporan pemerintah, dokumen APBN, jurnal ilmiah, dan studi-studi sebelumnya yang relevan.

Data yang dikumpulkan akan dipilih berdasarkan keabsahan, relevansi, dan kredibilitas. Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pola perubahan anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta implikasi terhadap kebijakan fiskal dan perekonomian nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia

Setiap tahun, Indonesia menyusun anggaran negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara filosofis, APBN merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, sehingga penetapannya dilakukan setiap tahun melalui undang-undang. APBN pada dasarnya mencerminkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara, dengan harapan pengelolaannya memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kewajiban. Di hampir

semua negara yang berlandaskan hukum, ketentuan mengenai anggaran negara diatur dalam konstitusi. (Putri Darma et al., 2024).

Anggaran pendapatan dan belanja merupakan hal penting saat sebuah negara berkembang. Anggaran dalam ekonomi berfungsi sebagai alat untuk kebijakan, bukan hanya untuk membiayai operasi pemerintah. Sebagai alat utama dalam kebijakan fiskal, APBN memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan pemerintah ke berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Alokasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan APBN secara efektif, pemerintah dapat mengatasi permasalahan struktural dalam perekonomiannya, seperti kesenjangan sosial dan rendahnya daya saing nasional, serta memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. (Ani Irwan, Hana Siti NAbila, Yolla Maharany Irawan, 2024).

APBN merupakan instrumen penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, pembahasan ini menunjukkan bagaimana APBN dialokasikan pada sektor-sektor yang strategis, khususnya infrastruktur dan pendidikan. Kedua sektor ini merupakan pilar utama yang diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan.

1) Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur

Infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana ketersediaan infrastruktur yang memadai di suatu wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Saat ini, pemerintah berupaya menambah belanja negara yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur, sarana

dan prasarana publik, konektivitas antar wilayah, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program KPR Sejahtera dan rumah susun. (Anisa Ilmia, 2020).

Menurut situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, belanja infrastruktur dalam APBN 2022 dialokasikan sebesar Rp125,9 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai 93,6 persen. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti sumber daya air, jalan, jembatan, pemukiman, dan lain-lain. (Ansari, 2023).

- 2) Alokasi Anggaran untuk Pendidikan
- Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan elemen penting yang harus tersedia, baik di tingkat negara maupun lembaga. Sesuai amanat Undang-Undang, pemerintah Indonesia mengalokasikan minimal 20% dari total APBN untuk pendidikan setiap tahun, termasuk anggaran daerah untuk gaji guru dan tenaga kependidikan (Fironika, 2015).

Dikutip pada situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) menyatakan bahwa berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan oleh Presiden RI, Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp722,6 triliun, 20 persen dari Belanja Negara yang mencapai sekitar Rp3.613,1 Trilyun. (Kemendikbud, 2024).

Selain dari pada itu, dikutip pada situs resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran menyatakan bahwa Pelaksanaan APBN 2024 akan penuh dengan tantangan. Hal tersebut disebabkan karena saat ini dunia sedang mengalami tantangan global pascapandemi. Faktor-faktor seperti dinamika perekonomian, geopolitik

global yang kompleks, potensi pandemi berikutnya, dampak digitalisasi, dan perubahan iklim perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dan kerja sama yang sinergis untuk menciptakan anggaran belanja yang berkualitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Fajri, 2024).

Dengan fokus kebijakan fiskal 2024, peran APBN harus dioptimalkan untuk mencegah tantangan dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi:

- a. APBN berfungsi sebagai penyangga untuk mengurangi dampak resesi ekonomi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
- b. APBN berperan sebagai sumber daya untuk pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pembangunan infrastruktur, serta mendukung reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi.
- c. APBN sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan menghapus kemiskinan ekstrem dan stunting.

Salah satu upaya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mewujudkan anggaran belanja negara yang berkualitas. Pada APBN 2024, total belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Angka ini meningkat 6,4% dibandingkan tahun 2023, dengan tujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan menjalankan prioritas nasional.

Belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 7,4% dibandingkan tahun 2023 untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain melalui: konstruksi IKN, penyediaan anggaran subsidi (energi dan non-energi), kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan, penyelesaian infrastruktur

prioritas, pelaksanaan pemilu 2024, serta pembayaran kewajiban pemerintah.

Selanjutnya, dalam APBN 2024, alokasi belanja negara juga difokuskan pada belanja prioritas, yaitu:

- a. Anggaran Pendidikan sebesar Rp665 triliun untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
- b. Anggaran Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun untuk mempercepat penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan di Indonesia.
- c. Anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp496,8 triliun untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
- d. Anggaran Infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- e. Anggaran Ketahanan Pangan sebesar Rp114,3 triliun untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.
- f. Anggaran Hukum dan Hankam sebesar Rp331,9 triliun untuk memperkuat ketertiban dan keamanan selama Pemilu 2024, mendukung pengamanan IKN, dan melaksanakan kegiatan operasional hukum serta hankam.
- g. Anggaran Subsidi sebesar Rp286 triliun untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, dan mendukung UMKM.

Untuk mencapai APBN yang sehat dan memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan sinergi dari semua pihak terkait dalam mewujudkan belanja negara yang terakselerasi, merata, dan berkualitas. Dengan mempertimbangkan arah dan strategi kebijakan APBN 2024,

diharapkan masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang telah dan akan diterapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, APBN dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. (Adzam et al., 2024).

Analisis APBN dari Periode Sebelumnya

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan merupakan bentuk pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. (Sayadi, 2021). Sebagai alat utama dalam pengelolaan keuangan negara, APBN berperan dalam mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian melalui kebijakan fiskal yang dirancang oleh pemerintah. Dengan demikian, APBN menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan negara memerlukan siklus APBN sebagai elemen penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan fiskal. Siklus APBN merupakan rangkaian tahapan dalam proses penganggaran yang mencakup penyusunan hingga pertanggungjawaban, dan siklus ini berlangsung secara berulang setiap tahun. Prinsip keseimbangan yang diupayakan dalam siklus APBN lebih mengutamakan asas keadilan dibandingkan dengan sekadar menjamin kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kepastian hukum yang pada dasarnya merujuk pada *sicherheit des rechts selbst*, yakni kepastian terhadap aturan hukum itu sendiri (Santoso et al., 2023).

- a. Pendapatan Negara Tahun 2020-2023

Anggaran pendapatan negara Indonesia untuk periode 2020-2023 mencerminkan interaksi yang kompleks antara kebijakan fiskal, tantangan ekonomi, dan reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen keuangan publik. Proses persiapan anggaran melibatkan pendekatan top-down dan bottom-up, membutuhkan koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam proyeksi pendapatan (Bramantyo et al., 2024)

Berikut disajikan data pendapatan negara yang mencakup target, dan realisasi selama periode tahun 2020 hingga 2023. Data ini memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan negara dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya serta tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan negara selama empat tahun terakhir.

Tabel 1. Pendapatan Negara Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	1.699.948,50	1.647.783,30
2	2021	1.743.648,60	2.011.347,00
3	2022	2.266.199,10	2.635.843,10
4	2023	2.463.024,90	2.783.929,70

Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan RI, 2024

Berdasarkan tabel 1 bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan negara dengan membandingkan target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya dengan realisasi yang dicapai selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan sebesar 1.647.783,30 miliar rupiah berada sedikit di bawah target yang ditetapkan, yaitu 1.699.948,50 miliar rupiah. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, realisasi pendapatan secara konsisten melampaui target, dengan peningkatan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 2.011.347,00 miliar rupiah,

melebihi target sebesar 1.743.648,60 miliar rupiah. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana realisasi pendapatan mencapai angka tertinggi sebesar 2.783.929,70 miliar rupiah, melampaui target sebesar 2.463.024,90 miliar rupiah. (Kementerian Keuangan RI, 2024)

Pendapatan negara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, baik dari sisi target maupun realisasi. Sejak tahun 2021, realisasi pendapatan secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja ekonomi nasional, yang kemungkinan didukung oleh efektivitas kebijakan fiskal pemerintah serta proses pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19 (Kemenkeu, 2023)

Pendapatan negara dalam APBN 2023 ditetapkan dengan target sebesar Rp2.463,0 triliun, yang mayoritas bersumber dari penerimaan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan diharapkan tumbuh sebesar 5,0 persen, didorong oleh optimalisasi kebijakan, pemulihan ekonomi, serta reformasi administrasi perpajakan. Sementara itu, PNBP diproyeksikan mencapai Rp441,4 triliun, dengan mempertimbangkan dampak moderasi harga komoditas (Putri Darma et al., 2024).

b. Belanja Negara tahun 2020-2023

Belanja negara merupakan pengeluaran yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan non-BBM, belanja hibah, belanja sosial (termasuk

penanganan bencana), serta belanja lainnya. Sementara itu, belanja daerah adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah, yang kemudian tercatat sebagai bagian dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Belanja daerah mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana otonomi khusus. (Zaelani et al., 2024)

Berikut disajikan data tentang belanja negara selama periode 2020-2023, yang mencakup target dan realisasi pengeluaran pemerintah. Informasi ini memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran negara beserta perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2 Belanja Negara Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	2.739.165,80	2.595.481,10
2	2021	2.750.028,00	2.786.411,40
3	2022	3.106.425,40	3.096.262,70
4	2023	3.061.176,30	3.121.217,20

Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan RI, 2024

Berdasarkan table 2 memuat data belanja negara dari tahun 2020 hingga 2023, yang menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi anggaran. Pada tahun 2020, target belanja negara sebesar 2,739,165.80 miliar rupiah terealisasi sebesar 2,595,481.10 miliar rupiah, menunjukkan adanya deviasi atau kurang dari target. Pada tahun 2021, meskipun target belanja meningkat menjadi 2,750,028.00 miliar rupiah, realisasi anggarannya justru melebihi target, mencapai 2,786,411.40 miliar rupiah. Hal ini menandakan adanya kelebihan pengeluaran. Di tahun 2022, target belanja sebesar 3,106,425.40 miliar rupiah berhasil terealisasi sebesar 3,096,262.70 miliar rupiah, yang menunjukkan penurunan sedikit dari target. Sementara itu, pada tahun

2023, realisasi belanja mencapai 3,121,217.20 miliar rupiah, melebihi target 3,061,176.30 miliar rupiah, menunjukkan over-execution kembali. Data ini menunjukkan fluktuasi dalam pelaksanaan anggaran, di mana pada beberapa tahun, belanja melebihi target, sementara di tahun lain, terjadi penurunan realisasi.

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, risiko seperti bencana alam dan dampak krisis global, fluktuasi ekonomi makro, serta kebijakan stimulus fiskal dan faktor lainnya (Amtiran, 2020). Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berperan dalam penentuan besaran belanja negara, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, potret APBN Indonesia menunjukkan bahwa anggaran berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui alokasi untuk infrastruktur dan pendidikan. Realisasi belanja negara dalam periode 2020-2023 menunjukkan fluktuasi, dengan beberapa tahun melebihi target dan beberapa tahun meleset. Hal ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan anggaran dan kebutuhan akan peningkatan efisiensi serta alokasi yang lebih tepat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Analisis terhadap APBN menunjukkan perbaikan kinerja, terutama dalam realisasi pendapatan yang melebihi target sejak 2021. Kenaikan pendapatan didukung oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan kebijakan fiskal yang efektif. Sementara itu, belanja negara mengalami variasi, dengan beberapa tahun melebihi dan beberapa tahun meleset dari target.

Faktor seperti kebijakan fiskal, bencana, dan dinamika ekonomi global memengaruhi realisasi belanja negara. Oleh karena itu, sinergi berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan anggaran yang lebih berkualitas dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzam, M., Etania, A. R., & Alviyani, F. A. (2024). Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 1–9. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jka-widyakarya/article/view/2958/2664>
- Aminah, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3193–3204.
- Amtiran, P. Y. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal Of Management*, 12(2), 203–214.
- Ani Irwan, Hana Siti NAbila, Yolla Maharany Irawan, N. A. F. (2024). Analisis Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sosial Ani. *Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(11), 121–127.
- Anisa Ilmia. (2020). Sukuk Negara Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 22.
- Ansari, N. (2023). *Pembangunan Infrastruktur Gunakan 93,4% Produk Dalam Negeri*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bramantyo, D., Kumala, D. W., & Yasin, M. (2024). Menganalisis Bagaimana Indonesia Menyusun Anggaran Untuk Menentukan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 2(3), 50–60.
- Chaniago, A. A. (2024). *Tata Kelola Batubara Rasa Kolonial*. Kompas. Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/07/18/tata-kelola-batubara-rasa-kolonial>
- CNN Indonesia. (2024). *Berdampak Luas, Ahli Beberkan 6 Bahaya PPN Naik Jadi 12 Persen*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241221081315-92-1179679/berdampak-luas-ahli-beberkan-6-bahaya-ppn-naik-jadi-12-persen>
- Desmawan, D., & Syaifudin, R. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8594>
- Fajri, T. K. D. & A. K. (2024). *APBN 2024: Optimalisasi Belanja Negara untuk Mendorong Transformasi Ekonomi di Tengah Tantangan Global*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.
- Fironika, R. (2015). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 43–64.
- Kemendikbud, P. W. (2024). *Kemendikbudristek dan DPR RI Gelar Diskusi Soroti Kebijakan Anggaran Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Kemenkeu. (2023). APBN Kita Desember 2023. *Kemenkeu.Go.Id*, 1–90. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Portal Data APBN*. Kementerian Keuangan RI. https://data-apbn.kemenkeu.go.id/data-series?akun=934c49c5-fdd5-4522-939a-74a067b20199&dari_tahun=2020&sampai_tahun=2024
- Pebriyanti, N., & Pidada, I. B. A. (2023).

- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bupati dalam Penyalahgunaan APBN di Kabupaten Tabanan. *Public Sphere: Jurnal ...*, 2(2), 10–16.
<https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.578>
- Pribadi, A. (2023). *PNBP Lampau Target, Menteri ESDM Sampaikan Rincian Torehan ESDM di Tahun 2022*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pnbp-lampau-target-menteri-esdm-sampaikan-rincian-torehan-esdm-di-tahun-2022->
- Putri, C. A., Noviantini, E. F., Ramadhani, F. N., & Fadilla, A. (2024). Peran APBN dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–9.
<https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.202>
- Putri Darma, S., Haliza, N., Aulia Br Ginting, D., & Kemala, P. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2506–2512.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1101>
- Ratna Wulandari, Ulil Farrohah, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Penerbitan Obligasi Negara Sebagai Alternatif Pendanaan Defisit APBN Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 18–29.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1249>
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 169–176.
<https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1599>
- Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 155–166.
<https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562>
- Sayadi, M. H. (2021). Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159–171.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.269>
- Zaelani, A. H., Nurjihan, N., & Sari, L. P. (2024). *Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara: Tinjauan APBN 2023*. 3(2), 631–650.